



POLITIK ANGGARAN 2017 DAN TANTANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Hariyadi*)

Abstrak

Politik anggaran 2017 menghadapi tantangan berat dengan kondisi perekonomian global dan belum optimalnya kinerja perekonomian nasional. Politik anggaran yang diarahkan pada kebijakan perpajakan yang kondusif, belanja yang lebih produktif, dan prioritas serta penguatan kebijakan pembiayaan anggaran, diharapkan akan semakin memperkokoh tahapan transformasi fundamental perekonomian nasional dan kebijakan percepatan pembangunan. Untuk mencapai hasil optimal pengelolaan anggaran 2017 juga harus ditopang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur fisik dan sosial, serta pengendalian inflasi. Upaya penguatan tersebut merupakan modalitas yang berharga seiring dengan kuatnya stabilitas politik nasional dan dukungan politik DPR RI.

Pendahuluan

Pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2017 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2016, menegaskan perubahan arah politik anggaran pada tahun 2017. Penegasan ini tentu disertai dengan optimisme pemerintah atas membaiknya kondisi ekonomi makro seperti terkendalinya tingkat inflasi dan kinerja pertumbuhan dalam triwulan kedua 2016 ini, serta terobosan transformasi fundamental perekonomian dan kebijakan percepatan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan sejumlah tantangan berat baik secara domestik maupun dari sisi konstelasi perekonomian global. Belum optimalnya kinerja perekonomian

nasional, daya saing perekonomian, dan perolehan pajak menggambarkan tantangan ini. Sementara itu, belum tuntasnya pemulihan perekonomian global, turunnya harga komoditas, dan rendahnya harga minyak dunia masih akan tetap memberikan tekanan yang cukup berarti. Dengan beratnya tantangan tersebut, RAPBN 2017 ditetapkan secara realistis, mampu menopang program prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Tulisan ini akan mencoba melihat tantangan pengelolaan anggaran 2017 dan analisis alternatif penyelesaiannya. Tulisan ini juga akan menyajikan secara ringkas gambaran politik anggaran 2017 beserta asumsi makro APBN 2017 sebagai acuan analisisnya.

*) Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: hariyadi@dpr.go.id



Politik Anggaran 2017

Tiga kebijakan utama akan mendasari arah RAPBN 2017. *Pertama*, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Perpajakan diarahkan untuk menopang pendapatan negara dan sekaligus sebagai sumber insentif untuk merangsang perekonomian nasional. Meskipun begitu, kebijakan ini juga dilakukan dalam batas-batas yang tetap dapat menjaga iklim investasi dan dunia usaha. *Kedua*, peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif dan prioritas khususnya dalam menysar percepatan pembangunan fisik dan sosial seperti infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. *Ketiga*, penguatan kebijakan pembiayaan anggaran untuk menopang ketahanan dan pengendalian risiko melalui pengelolaan defisit dan rasio utang.

Dengan tiga kebijakan utama tersebut dan situasi perekonomian global, pemerintah mengusulkan sejumlah asumsi makro penetapan pada RAPBN 2017 (Tabel 1). Postur RAPBN 2017 (Tabel 2) bagaimana pun masih terbatas ruang geraknya bagi upaya percepatan pembangunan meskipun arahnya tetap ditujukan untuk penajaman pada prioritas pembangunan dan belanja-belanja produktif.

Tantangan Penganggaran Tahun 2017

Pengajuan usulan asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2017 dipandang sebagai jalan moderat dalam rangka mengelola program percepatan pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, penganggaran tahun 2017 akan mengalami sejumlah tantangan. Tantangan itu mencakup dinamika perekonomian global yang semakin sulit diprediksikan berikut persoalan kinerja dan masih rendahnya daya saing perekonomian domestik akibat persoalan infrastruktur, pasokan energi, dan aspek tata kelola.

Aspek perekonomian global dan tingkat pemulihan perekonomian negara-negara maju mencerminkan tantangan pertama. Data IMF menunjukkan bahwa pasca-*Brexit* perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi global belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Data *World Economic Outlook* per Juli 2016 juga menunjukkan bahwa *Brexit* telah berdampak pada tingkat kinerja perekonomian global yang hanya mengalami kenaikan tipis

dari 3,1% menjadi 3,4%. Sampai akhir tahun, proyeksinya hanya mencapai 3,1% dari 2,9% dan bahkan bisa mengalami tingkat stagnasi yang hanya di kisaran 2,8%. Tingkat kinerja ini dipengaruhi oleh masih lesunya kinerja perekonomian maju negara-negara berkembang (*developing economies and emerging markets*). Data ini menguatkan asumsi bahwa kinerja perekonomian nasional masih akan menghadapi tekanan pertumbuhan sehingga sektor (konsumsi) domestik akan berperan penting. Dengan demikian dapat diperkirakan mengapa pemerintah mematok tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya mengalami kenaikan 0,1% (Tabel 1).

Tabel 1. Asumsi Makro RAPBN 2017 dan APBN-P 2016

Asumsi Makro	APBN-P 2016	RAPBN 2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%	5,3%
Inflasi	4,0%	4,0%
Nilai Tukar Rp terhadap USD	RP13.500	Rp13.300
Suku Bunga SPN 3 Bln	5,5%	5,3%
Harga ICP	USD40/barel	USD45/barel
Lifting minyak	820 barel/hari	780 barel/hari
Lifting gas	1.150 ribu barel setara minyak/hari	1.150 ribu barel setara minyak/hari

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016.

Kedua, skenario realisasi penerimaan pajak. Kebijakan pemangkasan anggaran APBNP-2016 (Rp133,8 triliun) secara politis menunjukkan 'kegagalan' pemerintah dalam menyiapkan postur anggaran yang realistis di tengah-tengah perekonomian global yang kurang kondusif dan rendahnya realisasi penerimaan (pengampunan) pajak. Sayangnya, postur RAPBN 2017 masih mematok pendapatan pajak yang tinggi karena hanya mengalami penurunan kecil kira-kira Rp44 triliun dari nilai APBN-P 2016 (Tabel 2). Dengan perkiraan Bank Indonesia atas realisasi pengampunan pajak yang hanya di kisaran Rp53 triliun, tingkat defisit APBN 2017 dapat berpotensi melebihi pagu yang ditetapkan. Pemerintah memang masih bisa menggunakan ruang defisit sebesar 0,59% dari yang ditetapkan sebesar 3% atau setara Rp55 triliun (2,41% dari RAPBN 2017). Namun demikian, jika kebijakan ini ditempuh tentu akan semakin memberikan tekanan terhadap variabel ekonomi makro, kondisi yang pada gilirannya justru akan semakin menggerogoti

Tabel 2. Postur APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 (dalam miliar rupiah)

Uraian	APBN-P 2016	RAPBN 2017
A. PENDAPATAN NEGARA	1.786.225,0	1.737.629,4
I. DALAM NEGERI	1.784.249,9	1.736.256,7
1. Perpajakan	1.539.166,2	1.495.893,8
2. PNB	245.083,6	240.362,9
II. HIBAH	1.975,2	1.372,7
B. BELANJA NEGARA	2.082.948,9	2.070.465,9
I. PEMERINTAH PUSAT	1.306.696,0	1.310.439,3
1. K/L	767.809,9	758.378,0
2. Non-K/L	538.886,1	552.061,3
II. TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA	776.252,9	760.026,7
1. Transfer ke Daerah	729.270,8	700.026,7
2. Dana Desa	46.982,1	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105.505,6)	(111.431,4)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	296.723,9	(332.836,6)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(2,35)	(2,41)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV+ V)	296.723,9	332.836,6

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016.

upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja. Belum lagi dampaknya terhadap inflasi.

Ketiga, persoalan rendahnya harga minyak dunia dan realisasi produksi minyak nasional. Penurunan kelebihan pasokan minyak dunia akibat penurunan produksi minyak non-OPEC dan gangguan pasokan telah membantu kenaikan harga minyak belakangan ini. Dengan penambahan pendapatan negara sebesar Rp3,3-4 triliun setiap kenaikan USD1, dampaknya tentu akan signifikan. Persoalannya, bagaimana asumsi ini dapat terpenuhi seiring dengan perkiraan masih moderatnya tingkat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi maju negara-negara berkembang. Sementara itu, *lifting* minyak kita pun terus merosot. Dalam waktu lima tahun terakhir target *lifting* selalu meleset. Oleh karena itu, tantangan menjaga dan/atau meningkatkan tingkat *lifting* minyak juga akan membantu ketahanan pembiayaan anggaran karena setiap kenaikan produksi 10 ribu barel/hari akan meningkatkan tambahan Rp1,6-3 triliun.

Pekerjaan Rumah Ke Depan

Kuatnya kemauan politik pemerintah bagi upaya percepatan pembangunan turut memberikan andil yang cukup penting dalam pengelolaan anggaran 2017. Hal ini menjadi modal yang berharga dalam menopang pengelolaan fiskal ke depan. Untuk

mengoptimalkan hasilnya, sejumlah hal, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut, tentu perlu disasar. *Pertama*, penguatan daya saing perekonomian nasional. Laporan Bank Dunia menunjukkan daya saing dan produktivitas manufaktur Indonesia terus mengalami penurunan akibat membelitnya persoalan infrastruktur dan konektivitas, perijinan, dan tingginya biaya logistik. Studi lain menyimpulkan hal yang sama meskipun belum mengalami fase deindustrialisasi. Studi tersebut juga mencatat bahwa baru sekitar 10% industri manufaktur kita yang melakukan ekspor karena masih terbatasnya jaringan nilai tambah global (*global value chains*). Hal ini sejalan dengan hasil survei *World Economic Forum* di 140 negara yang menunjukkan bahwa daya saing Indonesia mengalami penurunan dari posisi ke 34 ke posisi 37. *Kedua*, penguatan infrastruktur fisik dan sosial. APBN-P 2016 dan RAPBN 2017 memosisikan diri sebagai peletak dasar paradigma pembangunan yang lebih produktif dan bersifat Indonesiasentris. Peningkatan dana desa secara signifikan juga semakin memperkokoh paradigma ini. Dengan format politik anggaran seperti ini, tuntutan pengelolaan pembelanjaan untuk infrastruktur fisik dan sosial yang lebih akuntabel, efektif, dan efisien pun dipertaruhkan. *Ketiga*, pengelolaan inflasi. Pengelolaan tingkat inflasi yang moderat menjadikan pengelolaan fiskal akan semakin mudah terkontrol. Hal ini karena karakteristik

inflasi kita sangat rentan terutama sisi penawaran, yakni aspek produksi, distribusi, dan kebijakan tertentu terhadap komoditas strategis seperti BBM dan energi lainnya.

Ruang optimisme pemerintah dalam pengelolaan politik anggaran 2017 tetap terbuka seiring dengan kondusifnya konstelasi politik nasional. Penyatuan dukungan kekuatan politik yang semakin mengaburkan dikotomi antara kekuatan pemerintah dan oposisi pasca-perombakan kabinet merupakan modalitas penting bagi pengamanan program-program prioritas ke depan. Dalam perspektif ini, beratnya tekanan perekonomian global, pengelolaan politik anggaran 2017 secara relatif akan lebih mudah terkonsolidasikan.

Penutup

Politik anggaran 2017 diarahkan pada upaya pengelolaan anggaran yang semakin realistis dan kredibel dalam situasi perekonomian global yang kurang kondusif dan belum optimalnya kinerja perekonomian nasional. Dibarengi dengan optimisme kondisi ekonomi makro, hal ini tentu semakin memperkokoh tahapan transformasi fundamental perekonomian nasional dan kebijakan percepatan pembangunan nasional. Sejumlah tantangan domestik dan global bagaimana pun akan tetap menghantui pengelolaan anggaran 2017. Proses pengelolaan anggaran 2017 perlu ditopang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur fisik dan sosial, serta pengendalian inflasi. Upaya tersebut secara kekiniaan menjadi modalitas yang penting seiring dengan kuatnya stabilitas politik nasional bagi pengamanan program-program prioritas pemerintah ke depan. Karena itu, dengan tugas konstitusionalnya, peran penting DPR RI dalam proses perumusan penganggaran 2017 dan mengawal pengelolannya pun tidak kalah penting.

Referensi

- Dewan Perwakilan Republik Indonesia. (2016). Pidato Ketua DPR RI pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 dalam rangka Penyampaian Pidato Presiden RI Mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2017 Jakarta: Dewan Perwakilan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2016). Buku II. Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2016). Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2017 Beserta Nota Keuangannya. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- “Tancap Gas Memangkas Belanja”, *Tempo*, 15-21 Agustus 2016.
- Bank Indonesia. “Mengendalikan Inflasi Membangun Kekuatan Ekonomi”. *Tempo*, 15-21 Agustus 2016.
- Hidayat, Yopie. “Ketika Angka Berbicara”, *Tempo*, 15-21 Agustus 2016.
- Kementerian Ketenagakerjaan. “Indonesia Darurat Tenaga Kerja Kompeten dan Produktif”, *Tempo*, 15-21 Agustus 2016.
- Prasetyantoko, A. “Memaknai Kemerdekaan Ekonomi”, *Kompas*, 18 Agustus 2016.
- Verico, Kiki. “Masa Depan Daya Saing Indonesia”, *Tempo*, 15-21 Agustus 2016.
- Ekonom Bank Dunia ini Ungkap Turunnya Gairah Manufaktur RI, <http://finance.detik.com/read/2016/08/18/173547/3278293/4/ekonom-bank-dunia-ini-ungkap-turunnya-gairah-manufaktur-ri>, diakses 21 Agustus 2016.
- IMF. 2016. Growth Forecasts under Alternative Scenarios, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/WEOJul2016info.htm>, diakses 20 Agustus 2016.
- Kunarjo. “Defisit Anggaran Negara”, http://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/ku_narjo2__20091015125127__2354__0.pdf, diakses 21 Agustus 2016.
- Sri Mulyani: Realisasi *Tax Amnesty* Masih Jauh dari Target, <http://finance.detik.com/read/2016/08/15/212620/3276209/4/sri-mulyani-realisation-tax-amnesty-masih-jauh-dari-target>, diakses 21 Agustus 2016.
- World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2015-2016, <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/>, diakses 21 Agustus 2016.
- World Economic Forum. (2016). Competitiveness Rankings: Indonesia, <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#economy=IDN>, diakses 21 Agustus 2016.